RENCANA KERJA
TAHUN 2024

SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM
2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024.

Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Semoga Rencana Kerja 2024 ini dapat dipedomani oleh seluruh Aparatur Sekretariat DPRD Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan fungsi pelayanan kepada DPRD Kota Batam guna mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam pada umumnya dan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Batam pada khususnya.

Batam, 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM

ASPAWI NANGALI, S.Sos., MM

NIP. 19640509 198603 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM TAHUN LALU 11

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam 21

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam 29

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 32

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM 36

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 36

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Batam 45

3.3 Program dan Kegiatan 47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM 51

BAB V PENUTUP 65

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam s/d Tahun 2023 Kota Batam 12

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam 23

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Batam..... 33

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Batam 35

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 50

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024..... 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Keterkaitan Tahap Penyusunan RKPD dan Renja SKPD ... 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menegah dan pendek (tahunan) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di Pusat dan Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam adalah dokumen perencanaan tahunan OPD final sebelum dokumen Rencana Kerja ditetapkan yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi pedoman bagi OPD dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun.

Sekretariat DPRD Kota Batam sebagai OPD berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mengemban suatu tugas dan tanggung jawab dalam rangka membantu pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kota Batam. Tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta struktur organisasi sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dijabarkan dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 serta Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok, Fungsi Serta

Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD Kota Batam mempunyai tugas menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sebagai OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi, maka Sekretariat DPRD dapat melaksanakan fungsi secara optimal melalui program-program yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Batam, sehingga dapat menyusun target kerja yang akan dicapai dan memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kota Batam dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun sebelumnya dan mentargetkan capaian kinerja selanjutnya.

Rencana Kerja OPD memiliki keterkaitan erat dengan RKPD, RPJMD dan juga memperhatikan RPJPD. Upaya untuk mensinergikan program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2024 diantaranya melalui inventarisasi data, permasalahan dan potensi yang ada. Selain itu juga adanya usulan-usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, maupun usulan OPD terkait melalui forum OPD yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kota Batam. Sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, meliputi:
    a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Darah;
    b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
    c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
    d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, meliputi:
    a. Tahap perumusan Renja Perangkat Daerah;
    b. Tahap penyajian Renja Perangkat Daerah.
3. Pelaksanaan Musrembang tingkat Kelurahan/Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrembang tingkat Kota merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk penyempurnaan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas *(bottom-up planning)* berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.
4. Penetapan Renja Perangkat Daerah, penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran

berkenaan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam sesuai dengan amanat undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pebangunan nasional. Sekretariat DPRD Kota Batam mengikuti poin-poin penting yang terdapat pada RKPD Kota Batam. Penetapan Prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan serta berkelanjutan sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Gambar 1 Keterkaitan Tahap Penyusunan RKPD dan Renja SKPD

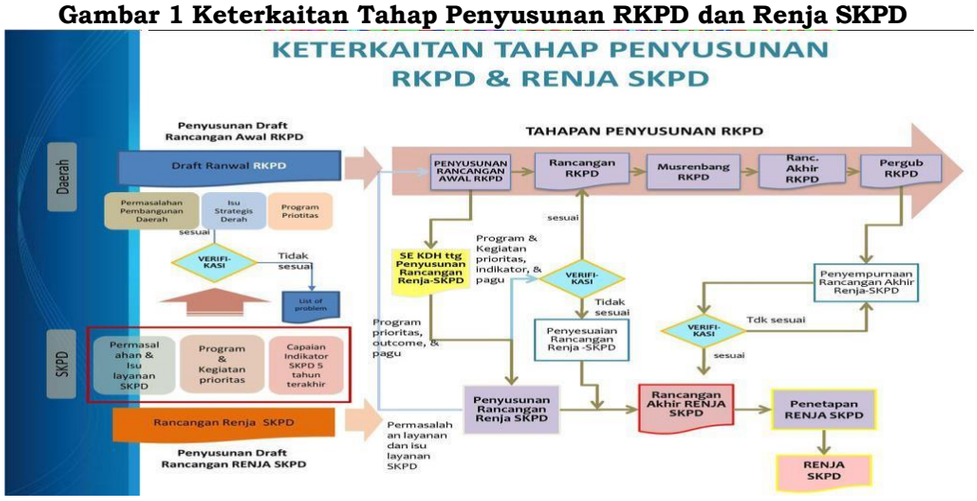

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
10. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 37 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 942);
24. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 942);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024 disusun dengan maksud yaitu:

1. Memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien;
2. Mempermudah pengendalian Kegiatan serta Sub Kegiatan dalam pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait di Lingkup Pemerintah Kota Batam terutama dalam hal monitoring, evaluasi serta hasil pelaporan pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan;
3. Acuan resmi bagi Pemerintah Kota Batam khususnya di Sekretariat DPRD Kota Batam dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) bagi Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2024;
4. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapa mencapai hasil secara optimal.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024 yaitu:

1. Sebagai penjabaran program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batam;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan dokumen penganggaran Tahun 2024;
3. Sebagai bahan evaluasi berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan sistematika meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Batam

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam

Pada tahun 2022 anggaran yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Batam sebesar **Rp. 132.863.737.353,00,-** (*Seratus tiga puluh dua milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*) dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 42.836.306.859,00,-** (*Empat puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 40.488.946.060,00,-** (*Empat puluh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam puluh rupiah*) atau sekitar **94.52%** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 90.027.430.494,00,-** (*Sembilan puluh milyar dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 80.636.981.723,00,-** (*Delapan puluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah*) atau sekitar **89.57%** yang tertuang dalam 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 49 (Empat Puluh Sembilan) Sub Kegiatan. Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam yang mengacu pada sasaran berdasarkan RPJMD dan Renstra Awal Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel T-C. 29 sebagai berikut:

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam s/d Tahun 2023 Kota Batam

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	02					Urusan : Penunjang Urusan Pemerintah									
4	02	01				Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Persentasi terpenuhinya administrasi umum Sekretariat DPRD Kab/Kota	94%	88%	89%	92%	103%	90%	270%	287%
4	02	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97%	92%	93%	94%	102%	94%	281%	289%
4	02	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	0%	0%	0%	0%	93%	93%	98%
4	02	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	72%	83%	89%	107%	84%	245%	273%
4	02	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	85%	69%	82%	96%	117%	83%	248%	292%
4	02	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98%	83%	98%	89%	91%	98%	270%	275%
4	02	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	95%	79%	91%	80%	88%	92%	252%	265%
4	02	01	2	15		Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	95%	60%	91%	74%	81%	92%	226%	237%
4	02	01	2	16		Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	85%	51%	81%	52%	65%	82%	186%	218%

4	02					Urusan Sekretariat DPRD								
4	02	02				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	84%	78%	76%	84%	110%	78%	240%	285%
							2. Persentase rekomendasi penyerapan aspirasi yang di laksanakan	84%	91%	76%	92%	122%	78%	261%	311%
4	02	02	2	01		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana	95%	74%	91%	80%	88%	92%	247%	260%
4	02	02	2	02		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	88%	81%	83%	87%	105%	85%	253%	287%
4	02	02	2	03		Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti	92%	87%	90%	68%	76%	90%	245%	267%
4	02	02	2	04		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	80%	84%	70%	96%	138%	73%	254%	317%
4	02	02	2	05		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	75%	98%	68%	100%	146%	68%	266%	355%
4	02	02	2	07		Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah yang ditindak lanjuti	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	02	02	2	08		Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi	90%	98%	82%	88%	108%	85%	272%	302%

Pencapaian target dan realisasi program dan kegiatan tahun 2021 pada Sekretariat DPRD Kota Batam dalam pelaksanaannya terdapat 13 kegiatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perubahan nomenklatur pada tahun 2022 sehingga terdapat perbedaan nama kegiatan dan sub kegiatan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 terdapat perubahan nomenklatur yang tertuang dalam Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-5-1317 Tahun 2023. Terdapat perbedaan nama Program dalam unsur Pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mana perbedaan ini terdapat pada Sistem SIPD sedangkan pada Dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yaitu Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Batam dengan realisasi ditahun 2021 sebesar 88% sedangkan untuk tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 89% dengan realisasi 92%.

Indikator Kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan realisasi ditahun 2021 sebesar 78% (Persentase peraturan daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu) dan sebesar 91% (Persentase rekomendasi penyerapan aspirasi yang di laksanakan) sedangkan target pada tahun 2022 sebesar 76% dengan realisasi sebesar 84% dan 92% untuk Program tersebut.

Penjelasan terkait pencapaian masing-masing indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Batam sebagai berikut:

Indikator : Indeks Kepuasan terhadap Kinerja Sekretariat DPRD.

1. Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, target kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun 2023 sebesar 93%. Pada tahun 2021 dan 2022 kegiatan ini tidak dianggarkan dan baru pada tahun 2023 dianggarkan dan akan dilaksanakan. Pada sub kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan atau bimbingan teknis untuk ASN belum dianggarkan dalam hal pelaksanaan akan dianggarkan didalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
2. Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, target kinerja Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD tahun 2021 sebesar 90% dengan Realisasi ditahun 2021 sebesar 60%. Target kegiatan tersebut pada tahun 2022 sebesar 91% dan realisasinya sebesar 74%, capaian pada kegiatan ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa Anggota DPRD Kota Batam yang tidak melaksanakan Medical Check Up sedangkan target untuk tahun 2023 sebesar 92%;
3. Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD, target kinerja Kegiatan Layanan Administrasi DPRD pada tahun 2021 sebesar 80% dengan Realisasi ditahun 2021 sebesar 51%. Target kegiatan tersebut pada tahun 2022 sebesar 81% sedangkan realisasi sebesar 52%, Capaian target kinerja pada kegiatan ini belum baik hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DPRD serta pelaksanaan rapat fraksi DPRD yang tidak dilaksanakan dikarenakan agenda lainnya. Untuk tahun 2023 Target yang ditetapkan sebesar 82%;

4. Persentase Rekomendasi Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah yang ditindak lanjuti, target kinerja Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah sebesar 65% pada akhir periode Renstra. Pada tahun 2021 hingga 2023 Kegiatan ini belum dilaksanakan namun tetap direncanakan dalam renstra mengingat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 ataupun pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 untuk Sekretariat DPRD terdapat nomenklatur kegiatan tersebut, namun untuk Sekretariat DPRD Kota Batam belum ada arahan untuk dilaksanakan.

Indikator : Presentase Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

5. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 92% dengan Realisasi Kegiatan ditahun 2021 sebesar 92%. Target kegiatan pada tahun 2022 sebesar 93% sedangkan realisasi sebesar 94%, pada kegitan ini capaian kinerja dapat dikatakan baik karena sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk PNS di Sekretariat DPRD Kota Batam dan pembayaran Honorarium yang sesuai dengan jumlah yang terdata pada saat itu serta belanja kebutuhan lainnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 94%;
6. Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2021 sebesar 72% dengan Realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ditahun 2021 sebesar 72%. Target kegiatan pada tahun 2022 sebesar 83% dan realisasinya sebesar 89%, capaian kinerja pada kegiatan tersebut dikatakan baik karena melebihi dari

target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh terpenuhinya kebutuhan guna menunjang kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kota Batam selama kurun waktu 1 Tahun. Untuk tahun 2023 Target yang ditetapkan sebesar 84%;

7. Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah, target kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 69% pada tahun 2021, Realisasi Kegiatan sebesar 69%. Target kegiatan pada tahun 2022 sebesar 82% dan realisasinya sebesar 96%, capaian kinerja pada kegiatan ini baik sekali karena melebihi dari target yang telah ditetapkan dan mengalami kenaikan capaian dari tahun 2021. Hal ini didukung dengan adanya pemenuhan pengadaan kebutuhan yang dianggarkan untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas di Sekretariat DPRD Kota Batam. Target ditahun 2023 sebesar 83% untuk kegiatan tersebut;

8. Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada tahun 2021 target kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 83% dengan realisasi Realisasi ditahun 2021 sebesar 83%. Target kegiatan tersebut pada tahun 2022 sebesar 98% dan realisasi sebesar 89%, capaian kinerja pada kegiatan ini belum maksimal hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa gaji tenaga kontrak yang tidak dibayarkan karena mengundurkan diri. Target ditahun 2023 sebesar 98% untuk kegiatan tersebut;

9. Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah, target kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 79% pada tahun 2021 dengan Realisasi ditahun 2021 sebesar 79%. Target kegiatan pada tahun

2022 sebesar 91% dan realisasinya sebesar 80%, capaian kinerja pada kegiatan ini belum maksimal karena disebabkan terdapat beberapa pekerjaan pemeliharaan tidak dapat dilaksanakan, Sedangkan pada tahun 2023 Target yang ditetapkan sebesar 92% untuk kegiatan tersebut.

Indikator : Indeks Kepuasan DPRD dan Masyarakat terhadap Layanan Sekretariat DPRD

10. Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti, target kinerja Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah sebesar 87% pada tahun 2021 dengan Realisasi Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah ditahun 2021 sebesar 87%. Target kegiatan tersebut pada tahun 2022 sebesar 90% dan realisasinya 68%, capaian kinerja pada kegiatatan tersebut belum sesuai dengan target yang ditetapkan hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa rapat yang tidak dilaksanakan. Target ditahun 2023 sebesar 90% untuk kegiatan tersebut;
11. Rata-rata Tingkat Keterlaksanaan Program Kerja Alat Kelengkapan DPRD, dengan target kinerja Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD sebesar 84% pada tahun 2021 dengan Realisasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD ditahun 2021 sebesar 84%. Target kegiatan tersebut pada tahun 2022 sebesar 70% dan realisasi sebesar 96% hal ini menunjukkan bahwa mengalami peningkatan dalam pencapaian terget. Hal ini tercapai dengan ada pemenuhan dalam kebutuhan guna menunjang kegiatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD serta Pegawai Sekretariat DPRD Kota Batam, dalam memenuhi pelatihan, pembayaran jasa, kebutuhan rapat dan pemenuhan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan selama

setahun kegiatan berjalan. Sedangkan untuk tahun 2023 Target sebesar 73% untuk kegiatan tersebut;

12. Persentase Rekomendasi Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti, target kinerja Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebesar 75%. Realisasi kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat ditahun 2021 sebesar 98%. Target kegiatan tersebut pada tahun 2022 sebesar 68% dengan realisasi sebesar 99,53%. Target capaian di tahun 2022 didukung dengan pemenuhan kebutuhan guna mendukung terlaksananya kegiatan yang telah dijalankan oleh DPRD Kota Batam. Target ditahun 2023 sebesar 68%;

13. Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terpenuhi, target kinerja Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD sebesar 98%. Realisasi Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD ditahun 2021 sebesar 98%. Target kegiatan tersebut pada tahun 2022 sebesar 68% dengan realisasi sebesar 88%. Hal ini didukung dengan pemenuhan kebutuhan selama 1 tahun kegiatan berjalan seperti kunjungan kerja, perlengkapan dan peralatan dan konsumsi rapat kegiatan. Target ditahun 2023 sebesar 68%.

Indikator : Persentase Perda yang disahkan

14. Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana, target kinerja Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sebesar 90% pada tahun 2021 dengan Realisasi Kegiatan sebesar 74%. Target kegiatan tersebut pada tahun 2022 sebesar 91% dengan realisasi sebesar 80% hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa rapat dan kunjungan kerja yang tidak dilaksanakan karena terdapat agenda lainnya. Target ditahun 2023

sebesar 92%;

15. Persentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan, pada tahun 2021 target kinerja Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran sebesar 81% dan Realisasi Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran ditahun 2021 sebesar 81%. Target kegiatan tersebut pada tahun 2022 sebesar 83% dengan realisasi kegiatan sebesar 87%, capaian kinerja pada kegiatan ini dikatakan baik karena melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini didukung dengan terpenuhinya kebutuhan dalam menunjang rapat, kunjungan kerja, kebutuhan alat kantor dan honorarium narasumber pada kegiatan tersebut. Target ditahun 2023 sebesar 85%.

Berdasarkan tabel evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam tahun 2021-2023 dan Capaian Renstra, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 banyak kegiatan yang memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sesuai Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1, Pemerintah Daerah dalam Menyusun APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengalokasi anggaran yang memadai untuk mendukung penangan pandemik *Corona Virus Disease* 2019 dan dampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan Adanya Permendagri tersebut Pemerintah Kota Batam mengalokasi anggaran dalam rangka penanganan Pandemik *Corona Virus Disease* 2019 yang meliputi:

a. adanya program pemulihan ekonomi;

b. perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
c. Dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019;*
d. Dukungan Kesehatan dalam penunjang pandemik *Corona Virus Disease 2019;*
e. Insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Pandemik *Corona Virus Disease 2019.*

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam

Analisa Kinerja terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam melalui program dan kegiatan yang di anggarkan, antara lain:

1. Masih belum maksimalnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar Bagian;
2. Masih minimnya jumlah sumber daya aparatur yang terampil, berkualitas dan ahli serta yang memiliki inovasi guna menciptakan terobosan-terobosan;
3. Masih diperlukannya peningkatan partisipasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
4. Masih diperlukannya peningkatan kompetensi dalam bentuk pelatihan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas maka diupayakan agar:

1. Memperkuat fungsi koordinasi dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tuntutan tantangan dimasa yang akan datang;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur yang terampil sesuai dengan bidang dan tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar tercipta

terobosan baru dalam pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih efektif dengan pola *top down* menjadi *bottom up*;

3. Meningkatkan partisipasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan;
4. Meningkatkan penyusunan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dapat dilakukan secara cermat dengan pertimbangan adanya kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan dari berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan pada tahun berjalan serta mengoptimalisasikan pelaksanaan program dan kegiatan melalui mekanisme manajemen Sekretariat DPRD Kota Batam yang pro aktif memonitor dan mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kota Batam

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			70 org/bln	86 org/bln	72 org/bln	74 org/bln	95%	-	72 org/bln	74 org/bln	
2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 dok	12 dok	13 dok	14 dok	85%	-	13 dok	14 dok	
3	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	235 paket	238 paket	240 paket	-	-	238 paket	240 paket	
4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	132 org	132 org	134 org	-	-	132 org	134 org	
5	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	95%	-	1 paket	1 paket	
6	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			3 paket	3 paket	4 paket	5 paket	98%	-	4 paket	5 paket	
7	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan			5 paket	5 paket	6 paket	7 paket	91%	-	6 paket	7 paket	
8	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			6 paket	6 paket	7 paket	8 paket	92%	-	7 paket	8 paket	

9	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	58%	-	1 paket	1 paket	
10	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	96%	-	2 dok	2 dok	
11	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			190 lap	190 lap	195 lap	196 lap	96%	-	195 lap	196 lap	
12	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			3 unit	3 unit	5 unit	6 unit	92%	-	5 unit	6 unit	
13	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			4 unit	4 unit	5 unit	8 unit	98%	-	5 unit	8 unit	
14	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			5 lap	5 lap	6 lap	7 lap	75%	-	6 lap	7 lap	
15	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	75%	-	12 lap	12 lap	
16	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			13 lap	13 lap	13 lap	13 lap	96%	-	13 lap	13 lap	
17	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			25 unit	25 unit	26 unit	27 unit	70%	-	26 unit	27 unit	
18	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			50 unit	50 unit	51 unit	52 unit	97%	-	51 unit	52 unit	

19	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			5 unit	5 unit	6 unit	8 unit	84%	-	6 unit	8 unit	
20	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			-	50 org/bln	50 org/bln	50 org/bln	-	-	50 org/bln	50 org/bln	
21	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan			2 paket	2 paket	3 paket	4 paket	80%	-	3 paket	4 paket	
22	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			50 org	50 org	50 org	50 org	52%	-	50 org	50 org	
23	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	76%	-	12 lap	12 lap	
24	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			3 lap	3 lap	5 lap	8 lap	39%	-	5 lap	8 lap	
25	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			15 dok	15 dok	16 dok	17 dok	90%	-	16 dok	17 dok	
26	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			12 dok	12 dok	14 dok	15 dok	73%	-	14 dok	15 dok	
27	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan			-	-	2 dok	3 dok	-	-	2 dok	3 dok	
28	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi			5 dok	5 dok	6 dok	7 dok	90%	-	6 dok	7 dok	
29	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun			20 dok	20 dok	22 dok	24 dok	83%	-	22 dok	24 dok	
30	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			20 dok	20 dok	22 dok	24 dok	83%	-	22 dok	24 dok	

31	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			20 dok	20 dok	22 dok	24 dok	98%	-	22 dok	24 dok	
32	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			24 dok	24 dok	26 dok	28 dok	93%	-	26 dok	28 dok	
33	Jumlah Dokmen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			24 dok	24 dok	26 dok	28 dok	75%	-	26 dok	28 dok	
34	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester			36 dok	36 dok	38 dok	40 dok	91%	-	38 dok	40 dok	
35	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			22 dok	22 dok	24 dok	26 dok	87%	-	24 dok	26 dok	
36	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	72%	-	12 lap	12 lap	
37	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	74%	-	12 lap	12 lap	
38	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	70%	-	12 lap	12 lap	
39	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	74%	-	12 lap	12 lap	
40	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	40%	-	12 lap	12 lap	
41	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			-	3 dok	4 dok	5 dok	-	-	4 dok	5 dok	

42	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran			-	12 lap	14 lap	15 lap	-	-	14 lap	15 lap	
43	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			27 dok	27 dok	28 dok	29 dok	63%	-	28 dok	29 dok	
44	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD			-	-	50 dok	50 dok	-	-	50 dok	50 dok	
45	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			2 dok	2 dok	3 dok	3 dok	90%	-	3 dok	3 dok	
46	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			23 org	23 org	25 org	27 org	98%	-	25 org	27 org	
47	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			9 org	9 org	9 org	9 org	100%	-	9 org	9 org	
48	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			150 dok	150 dok	150 dok	155 dok	88%	-	150 dok	155 dok	
49	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD			15 dok	15 dok	16 dok	18 dok	99%	-	16 dok	18 dok	
50	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			90 dok	90 dok	91 dok	93 dok	94%	-	91 dok	93 dok	
51	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD			-	-	22 lap	24 lap	-	-	22 lap	24 lap	
52	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun			52 dok	52 dok	52 dok	52 dok	72%	-	52 dok	52 dok	
53	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	-	3 dok	3 dok	

54	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah			-	-	3 dok	4 dok	-	-	3 dok	4 dok	
55	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun			-	-	3 dok	4 dok	-	-	3 dok	4 dok	
56	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			24 dok	24 dok	25 dok	26 dok	87%	-	25 dok	26 dok	
57	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun			3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	88%	-	3 lap	3 lap	
58	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	87%	-	12 dok	12 dok	
59	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			109 dok	109 dok	110 dok	112 dok	90%	-	110 dok	112 dok	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam

a. Isu-isu terkait penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam, dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi, jumlah pegawai dan sarana/prasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dan digerakkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pegawai, sarana/prasarana yang belum lengkap dan kurang memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan;
3. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspons dengan baik, melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat;
4. Dibutuhkannya hubungan yang harmonis antar bagian, sub bagian dan aparatur agar terciptanya pelayanan yang prima terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
5. Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka makin meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam;
6. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah akan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD memiliki tujuan yang jelas dan terarah;

b. Tingkat Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam

Memperhatikan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam sesuai dengan tugas dan fungsinya pada Tahun 2023 dapat disimpulkan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam sangat baik. Hal tersebut merupakan hasil dari wujud integritas dalam proses perencanaan strategis dan analisa pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan bersifat penting yakni adanya pemantauan aktivitas dalam proses penyusunan dokumen atau pelaksanaan kegiatan.

c. Permasalahan dan Hambatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yakni:

a) Manajemen SDM yang belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kota Batam;
b) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, seperti struktur organisasi dalam peningkatan kinerja;
c) Belum optimalnya tingkat pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya jumlah SDM terkhusus ASN yang berkualitas baik dari Bidang Ilmu Pengetahuan, Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Teknologi;
d) Kurangnya Pemahaman ASN terhadap Tupoksi, Aturan, Perundang-Undangan dan Kaidah Hukum dan Pemerintahan;

e) Ketidaksesuaian penempatan ASN yang tidak sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

Selain permasalahan tersebut, terdapat hambatan pada Sekretariat DPRD Kota Batam yaitu:

a) Terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan DPRD sehingga didalam pelaksanaan sangat bergantung pada DPRD. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan terkadang tidak sesuai dengan rencana atau jadwal yang telah disusun/tetapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Batam.

d. Peluang dan Tantangan

Terdapat peluang yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam, meliputi:

a) Sumber daya manusia dengan tingkat Pendidikan yang tinggi;
b) Mengoptimalkan kinerja dalam pelayanan terhadap DPRD;
c) Melaksanakan pelatihan terkait pelayanan publik secara berkala bagi DPRD;
d) Adanya kualitas sarana dan prasarana yang cukup memadai;
e) Tersedianya ketatalaksanaan untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi;
f) Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas DPRD.

Selain peluang juga terdapat beberapa tantangan yang ada pada Sekretariat DPRD, tantangan tersebut ialah:

a) Terbatasnya sarana dan prasarana, baik dari segi *software* maupun *hardware* dalam menunjang kinerja Sekretariat DPRD;

b) Keterbatasan jumlah ASN yang memahami Tupoksi yang dapat mengimbangi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada DPRD;

c) Kurangnya pelatihan bagi ASN di Sekretariat DPRD Kota Batam.

e. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam

Keterkaitan isu-isu terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam, diuraikan sebagai berikut:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pegawai khususnya ASN yang berkompeten dan berkualitas di Bidang Ilmu Pengetahuan, Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Teknologi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD sehingga tidak bisa mengimbangi dalam memberikan pelayanan kepada DPRD;

b. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari Anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Hal tersebut merupakan tantangan yang harus direspon dengan baik, melalui dukungan kinerja Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksaan yang cepat, tepat dan akurat;

c. Adanya Lingkuran kerja yang hamonis dan hubungan koordinasi yang bersinergi antara lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta adanya dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat menumbuhkan semangat kerja dalam melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka makin meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel T-C. 31 sebagai berikut:

Tabel T-C. 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kota Batam

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Batam	Persentasi terpenuhinya administrasi umum Sekretariat DPRD Kab/Kota	92%	60.824.673.225	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Batam	Persentasi terpenuhinya administrasi umum Sekretariat DPRD Kab/Kota	92%	63.027.586.843	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	9.031.764.050	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	10.686.789.239	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94%	671.379.480	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94%	701.959.512	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85%	2.473.351.933	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85%	2.885.224.200	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	84%	952.566.938	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	84%	1.537.917.916	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98%	6.519.103.553	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98%	9.395.721.740	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	93%	2.161.649.720	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	93%	3.351.775.938	
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Batam	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	93%	37.673.755.550	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Batam	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	93%	33.526.372.298	
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Batam	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	83%	1.341.102.000	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Batam	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	83%	941.826.000	

2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Batam	1. Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	80%	15.196.826.054	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Batam	1. Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	80%	13.130.569.468	
			2. Persentase rekomendasi penyerapan aspirasi yang di laksanakan	80%	62.743.315.224			2. Persentase rekomendasi penyerapan aspirasi yang di laksanakan	80%	45.291.663.336	
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Batam	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana	93%	6.752.328.474	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Batam	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana	93%	6.168.607.968	
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Batam	Persentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	86%	8.444.497.580	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Batam	Persentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	86%	6.961.961.500	
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Batam	Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti	92%	4.949.720.562	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Batam	Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti	92%	2.326.665.000	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Batam	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	75%	25.368.519.175	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Batam	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	75%	17.904.533.336	
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Batam	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	70%	14.212.290.396	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Batam	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	70%	8.570.969.500	
	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Batam	Persentase Rekomendasi Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah yang ditindak lanjuti	65%	910.540.944	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Batam	Persentase Rekomendasi Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah yang ditindak lanjuti	65%	-	
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Batam	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi	87%	17.302.244.147	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Batam	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi	87%	16.489.495.500	

Berdasarkan tabel T-C. 31 dapat dilihat bahwa Pagu Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 untuk Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sejumlah Rp. 60.824.673.225,- dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sejumlah Rp. 77.940.141.278,-. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan Pagu Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sejumlah Rp. 63.027.586.843,- dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sejumlah Rp. 58.422.232.804,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2024 di Sekretariat DPRD Kota Batam sebagai berikut:

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kota Batam

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumberdaya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi RPJMN Tahun 2021-2024, yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan 8 Misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mereformasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif

dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampui kekuatan esensial minimum dan disegani dikawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen Negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai

pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional Dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran. Dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan duniainternasional Dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerjasama

internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga diberbagai bidang.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok yakni:

1) Merosotnya kewibawaan negara;
2) Melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional;
3) Merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan:

I. Dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tatakelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi;
II. Dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan;
III. Dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2021-2026, Pemerintah Kota Batam dalam RPJMD 2021-2026 telam menetapkan Visi dan Misi.

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan urusan kepemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026:

"Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera"

Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2026, yaitu "Bandar Dunia", "Madani", "Modern" dan "Sejahtera". Pokok visi "Bandar Dunia", "Madani", dan "Sejahtera" menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai di tahun 2026, sementara pokok visi "Modern" menunjukkan penekanan cara atau 'bagaimana' untuk mencapai ketiga pokok visi lainnya. Makna terinci dari keempat pokok visi di atas adalah sebagai berikut:

a. "Bandar Dunia" mengandung makna Kota Batam diarahkan menjadi Kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi *"center of excellence"*.
b. "Madani" bermakna pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep civil society yang religius.
c. "Sejahtera" mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada.
d. "Modern" mengandung makna sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan

inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Pokok visi “modern” menjadi cara atau strategi bagaimana mencapai tiga pokok visi lainnya. Pengembangan Kota Batam dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk membiasakan dan mendorong pentahelix pembangunan, meliputi pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi maupun lembaga di masyarakat, berperilaku “modern” untuk mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani dan Sejahtera.

Untuk mencapai visi “TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021-2026 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaran pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama dan keempat, Kota Batam sebagai “Bandar Dunia” yang “Modern”. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagi tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi *"center of excellence"* di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan

atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.

2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang. Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai "Bandar Dunia" yang "Modern". Untuk menciptakan Kota Batam sebagai Kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, mutilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui Kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi Kota yang layak huni.

3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Sejahtera" dan "Modern", yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.

4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus “Bandar Dunia” yang “Modern”. Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera” akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah hinterland, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah mainland/kota.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Madani” yang “modern”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berbanding lurus dengan konsep civil society yang tetap mengedepankan sikap religius. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan

pemeritahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.

Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kota Batam menetapkan tujuan "Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD".

Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan Trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang berkualitas dan partisipatif yang mampu mangakomodir kepentingan masyarakat. Dari uraian diatas dalam mendukung tercapaianya kebijakan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD.

Tugas utama **:** Memfasilitasi lembaga DPRD dalam melaksanakan 3 (tiga) fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

Tugas Pendukung **:** Menyediakan sarana dan Prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam menunjang peningkatan kinerja DPRD sangat dibutuhkan faktor pendukung sarana dan prasarana yang memadai serta Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang terampil, akuntabel dan profesional sehingga tugas dan fungsi fasilitasi terhadap pelaksanaan 3 fungsi Anggota

DPRD yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Batam

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mengemban suatu tugas dan tanggung jawab dalam rangka membantu pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kota Batam.

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta struktur organisasi sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 dan dijabarkan dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 serta Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam, dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD Kota Batam mempunyai tugas menyelenggarakan administrasif kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 37 tahun 2021 dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Batam dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, yang berkedudukan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD

dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat DPRD Kota Batam pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Batam. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka ditetapkan tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Batam. Tujuan strategis ditetapkan dengan merumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah untuk mencapai visi dan misi. Tujuan strategis ini merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai, adapun tujuan strategis yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kinerja pelayanan SDM Sekretariat yang bermuatan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi serta berlandaskan Iman dan Taqwa dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada DPRD;
b. Meningkatkan pengembangan komunikasi dan publikasi kegiatan DPRD Kota Batam;
c. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan DPRD Kota Batam;
d. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah yang baik, bersih, efisien, transparan serta perencanaan yang efektif dan Akuntabel;
e. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana kerja untuk menunjang pelaksanaan fungsi DPRD;
f. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya Sekretariat DPRD Kota Batam dapat dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2023, yaitu:

a. Tujuan Sekretariat DPRD Kota Batam adalah Meningkatkan kualitas pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Batam. Tujuan Sekretariat DPRD Kota Batam berpedoman dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam dan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021.

b. Sasaran Sekretariat DPRD Kota Batam yang berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam serta Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021. Sasaran Sekretariat DPRD Kota Batam adalah Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Optimalnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Batam.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada tahun 2024 yang terdiri dari 4 (empat) indikator antara lain:

A. Indikator : Indeks Kepuasan terhadap Kinerja Sekretariat DPRD.

1. Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, target kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 94%;
2. Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, target kinerja Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD sebesar 93%;
3. Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD, target kinerja

Kegiatan Layanan Administrasi DPRD sebesar 83%;

4. Persentase Rekomendasi Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah yang ditindak lanjuti, target kinerja Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah sebesar 65%.

B. Indikator : Persentase Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

1. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 95%;
2. Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 85%;
3. Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah, target kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 84%;
4. Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 98%;
5. Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah, target kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 93%.

C. Indikator : Indeks Kepuasan DPRD dan Masyarakat terhadap Layanan Sekretariat DPRD

1. Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti, target kinerja Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah sebesar 92%;
2. Rata-rata Tingkat Keterlaksanaan Program Kerja Alat Kelengkapan DPRD, target kinerja Kegiatan Peningkatan Kapasitas sebesar 75%;
3. Persentase Rekomendasi Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang

ditindaklanjuti, target kinerja Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebesar 70%;

4. Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terpenuhi, target kinerja Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD sebesar 87%.

D. Indikator : Persentase Perda yang disahkan

1. Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana, target kinerja Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sebesar 93%;
2. Persentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan, target kinerja Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran sebesar 86%.

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batam
Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kota Batam

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	02	01				Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Persentasi terpenuhinya administrasi umum Sekretariat DPRD Kab/Kota	Batam	90%	60.824.673.225	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		92%	60.824.673.225
4	02	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	94%	11.486.789.239	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		95%	9.031.764.050
4	02	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	93%	336.372.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		94%	671.379.480
4	02	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	84%	2.885.250.368	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85%	2.473.351.933
4	02	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	Batam	83%	4.000.905.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		84%	952.566.938
4	02	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	98%	9.375.323.060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		98%	6.519.103.553
4	02	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Batam	92%	10.090.123.120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		93%	2.161.649.720
4	02	01	2	15		Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Batam	92%	33.526.372.298	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		93%	37.673.755.550
4	02	01	2	16		Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	Batam	82%	941.826.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		83%	1.341.102.000
4	02	02				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Batam	78%	13.586.404.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80%	15.196.826.054
							2. Persentase rekomendasi penyerapan aspirasi yang di laksanakan		78%	55.503.175.822	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80%	62.743.315.224
4	02	02	2	01		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana	Batam	92%	5.945.480.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		93%	6.752.328.474
4	02	02	2	02		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	Batam	85%	7.161.322.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86%	8.444.497.580
4	02	02	2	03		Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti	Batam	90%	2.326.665.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		92%	4.949.720.562
4	02	02	2	04		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	Batam	73%	16.423.190.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75%	25.368.519.175
4	02	02	2	05		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	Batam	68%	12.805.129.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70%	14.212.290.396
4	02	02	2	07		Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah yang ditindak lanjuti	Batam	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65%	910.540.944
4	02	02	2	08		Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi	Batam	85%	17.639.495.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		87%	17.302.244.147

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Rencana Kerja Tahun 2024 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Penyusunan kegiatan dan sub kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien guna memanfaatkan dana APBD dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Program dan Rencana Kerja operasional Sekretariat DPRD Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Berdasarkan program tersebut, Sekretariat DPRD Kota Batam pada tahun 2024 menetapkan rencana kerja dengan program dan kegiatan pada tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM PENDUKUNG

A. Program Administrasi Umum Sekretarat DPRD Kabupaten/Kota, terdiri atas kegiatan:

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

a. Pengadaan Mebel;
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:**

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

7) **Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:**

a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;

b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;

c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

8) **Layanan Administrasi DPRD, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:**

a. Fasilitasi Fraksi DPRD;

b. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

PROGRAM UTAMA

B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri atas kegiatan:

1) **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:**

a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan daerah;

b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;

d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik;

e. Penyusunan Tata Tertib DPRD.

2) Pembahasan Kebijakan Anggaran, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

a. Pembahasan KUA dan PPAS;

b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

c. Pembahasan APBD;

d. Pembahasan APBD Perubahan;

e. Pembahasan Laporan Semester;

f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;

b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;

c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;

d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;

e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam;

f. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa Keuangan;

g. Pengawasan Penggunaan Anggaran;

h. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

4) Peningkatan Kapasitas DPRD, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

a. Orientasi DPRD;
b. Pendalaman Tugas DPRD;
c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
f. Penyusunan Program Kerja DPRD;
g. Publikasi dan Dokumentasi DPRD.

5) Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

a. Kunjungan Kerja dalam Daerah;
b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
c. Pelaksanaan Reses.

6) Pembahasan Kerja Sama Daerah, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

a. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah;
b. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

7) Fasilitasi Tugas DPRD, terdiri dari sub kegiatan diantaranya:

a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD;

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					SEKRETARIAT DPRD								121.449.819.647,00		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								121.449.819.647,00		
4	02				SEKRETARIAT DPRD								121.449.819.647,00		
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								63.027.586.843,00		
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10.686.789.239,00		
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92 %	86 Orang/bulan	95 %	10.584.909.239,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92 %	13 Dokumen	95 %	101.880.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								701.959.512,00		
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pemenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	238 Paket	94 %	365.587.512,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	132 Orang	94 %	336.372.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2.885.224.200,00		
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	1 Paket	85 %	170.591.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	4 Paket	85 %	821.513.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	6 Paket	85 %	136.122.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	7 Paket	85 %	644.297.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	1 Paket	85 %	446.676.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	2 Dokumen	85 %	260.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	195 Laporan	85 %	405.625.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.537.917.916,00	
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	5 Unit	84 %	603.175.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	5 Unit	84 %	934.742.916,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								9.395.721.740,00	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	6 Laporan	98 %	1.992.680.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	12 Laporan	98 %	127.060.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	13 Laporan	98 %	7.275.981.340,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3.351.775.938,00	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	26 Unit	93 %	1.040.882.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	51 Unit	93 %	612.692.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	6 Unit	93 %	1.698.201.338,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								33.526.372.298,00		
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD										
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Persentase pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	50 Orang/Bulan	93 %	32.634.398.298,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD										
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Persentase pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	3 Paket	93 %	716.974.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD										
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Persentase pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	50 Orang	93 %	175.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD								941.826.000,00		
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD										
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	12 Laporan	83 %	107.712.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD										
						Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	92 %	5 Laporan	83 %	834.114.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								58.422.232.804,00		
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								6.168.607.968,00		
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah										
						Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Peraturan daerah yang dibahas sesuai rencana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	16 Dokumen	93 %	2.039.064.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah									
						Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Peraturan daerah yang dibahas sesuai rencana	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	14 Dokumen	93 %	3.364.236.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan									
						Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Persentase Peraturan daerah yang dibahas sesuai rencana	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	0 Dokumen	93 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik									
						Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Persentase Peraturan daerah yang dibahas sesuai rencana	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	6 Dokumen	93 %	492.180.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD									
						Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Persentase Peraturan daerah yang dibahas sesuai rencana	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	22 Dokumen	93 %	273.127.468,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran								6.961.961.500,00	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS									
						Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase hasil pembahasan kebijakan anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	22 Dokumen	86 %	1.110.882.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
						Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase hasil pembahasan kebijakan anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	22 Dokumen	86 %	1.058.092.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD									
						Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Persentase hasil pembahasan kebijakan anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	26 Dokumen	86 %	1.106.935.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan									
						Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Persentase hasil pembahasan kebijakan anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	26 Dokumen	86 %	974.808.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester									
						Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Persentase hasil pembahasan kebijakan anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	38 Dokumen	86 %	1.386.697.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD									
						Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase hasil pembahasan kebijakan anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	24 Dokumen	86 %	1.324.546.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								2.326.665.000,00	
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum									
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	12 Laporan	92 %	352.284.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur									
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	12 Laporan	92 %	222.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat									
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	12 Laporan	92 %	352.284.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian									
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	12 Laporan	92 %	352.284.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam									
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	12 Laporan	92 %	134.124.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan									
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	0 Dokumen	92 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran									
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	0 Dokumen	92 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah									
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	28 Dokumen	92 %	912.849.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD								17.904.533.336,00	
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD									
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	0 Dokumen	75 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD									
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	3 Dokumen	75 %	1.411.166.562,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli									
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	25 Orang	75 %	1.990.234.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi									
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	9 Orang	75 %	546.161.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat									
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	150 Dokumen	75 %	921.070.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD									
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	16 Dokumen	75 %	7.494.466.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 %	91 Dokumen	75 %	5.541.435.574,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								8.570.969.500,00		
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah										
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Persentase Rekomendasi hasil penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80%	0 Laporan	70%	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD										
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Persentase Rekomendasi hasil penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80%	52 Dokumen	70%	102.649.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses										
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Persentase Rekomendasi hasil penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80%	3 Dokumen	70%	8.468.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah								0,00		
4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah										
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Persentase Rekomendasi hasil Pembahasan kerja sama Daerah yang ditindaklanjuti	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80%	0 Dokumen	65%	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi										
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Persentase Rekomendasi hasil Pembahasan kerja sama Daerah yang ditindaklanjuti	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80%	0 Dokumen	65%	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD								16.489.495.500,00		
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD										
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80%	25 Dokumen	87%	7.011.806.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD										
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Persentase Fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80%	3 Laporan	87%	216.981.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah										
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80%	12 Dokumen	87%	3.505.287.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD										
						Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi	- Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80%	110 Dokumen	87%	5.755.421.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Dalam mengintensifikasikan penyelenggaraan kesekretariatan yang professional untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD merupakan prioritas utama Sekretariat DPRD Kota Batam. Melalui peningkatan kinerja pelayanan SDM Sekretariat yang bermuatan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi serta berlandaskan Iman dan Taqwa dalam melaksanakan fungsi pelayanan guna meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD, diantaranya;

a. Meningkatkan pengembangan komunikasi dan publikasi kegiatan DPRD Kota Batam;
b. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan DPRD Kota Batam;
c. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah yang baik, bersih, efisien, transparan serta perencanaan yang efektif dan Akuntabel;
d. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana kerja untuk menunjang pelaksanaan fungsi DPRD;
e. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

BAB V

PENUTUP

Dalam Pencapaian keberhasilan mewujudkan Visi Sekretariat DPRD "Terwujudnya Sekretariat DPRD Kota Batam yang professional dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD melalui kepemerintahan yang baik" serta untuk mewujudkan Visi Kota Batam "Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan sejahtera" maka perlu adanya komitmen, semangat, kemauan dan tekad bersama serta meningkatkan etos kerja yang lebih baik yang tercermin dalam kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dirumuskan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024 merupakan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD. Renja Sekretariat DPRD Merupakan dasar atau acuan dalam pembuatan Renja yang memuat pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Pimpinan dan Staf Sekretariat DPRD Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Ditetapkannya Rencana Kerja SKPD Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024 diharapkan Kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam dapat berjalan dengan baik. Perumusan Renja SKPD Sekretariat DPRD Kota Batam dapat berhasil dengan baik, tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik itu yang bersifat internal maupun eksternal.